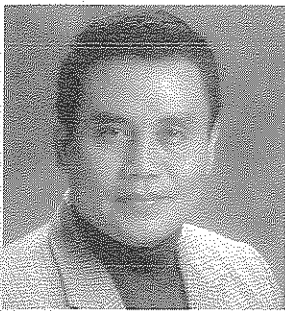


004



## Kombes Anton Tabah

# Sekilas Kesiapan POL



2004  
PEMILIHAN UMUM

**KABID** Mitra Div Humas Polri, Komusaris Besar Polri Anton Tabah menjelaskan dalam melakukan pengamanan, Polri sudah memiliki kalender Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) baik

secara rutin dan tidak rutin.

Kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat berupa: Hari raya Keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Nyepi, Galungan, dll. Acara yang diadakan secara lokal, yaitu pesta adat, seperti: Karapan sapi di Madura. Hari-hari nasional, yaitu: 17 Agustus hari kemerdekaan, Tahun Baru. Pesta politik pemilu.

Anton Tabah mengatakan, dalam pemilu sudah menjadi salah satu kegiatan rutin Polri dalam melakukan pengamanan. Polri sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Pada masa orde baru sudah mengalami 6 pemilu. Yaitu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan Pemilu awal era reformasi tahun 1999. dari pengalaman-pengalaman tersebut menjadi modal yang sangat berharga.

Di pemilu 2004 ini terdapat kekhasan yang belum pernah dilakukan dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Karena dulu hanya memilih badan legislative saja. Sekarang memilih DPR, DPRD, DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pemilihan umum untuk memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu kali ini berbeda sebab akan memilih tidak hanya anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yaitu langsung mencoblos nama yang sudah tertera di kertas suara, demikian penjelasannya.

Dalam kampanye Pemilu pada jaman Orba dilaksanakan selama 2 bulan. Sedang pemilu 2004 yang akan datang dilakukan selama 8 bulan. Disamping itu dalam pemilu ini dalam melakukan pengamanan akan

lebih rumit. Sebab jumlah partai lebih banyak yaitu 24 partai politik, sedangkan jaman Orba hanya tiga partai politik.

Polri menurunkan jumlah personil sebanyak dua pertiga dari jumlah kekuatan organik. Jumlah tersebut diusahakan cukup untuk melaksanakan tugas seperti pemilu-pemilu yang lalu. Polri dalam melakukan pengamanan mendapatkan bantuan dari kekuatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) seperti Hansip, Kamra, Satpam, dll.

Anton Tabah yang juga Staf Khusus Kapolri dan dosen luar biasa UGM Yogyakarta itu menjelaskan dalam pengamanan pemilu terdapat beberapa tahapan, yaitu: tahapan awal dan tahapan inti. Tahapan awal yakni kegiatan persiapan penetapan jumlah penduduk sampai dengan pengesahan dan pengumuman Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahap ini kecil kemungkinan untuk pengerahan massa besar-besaran. Jadi penyelenggaraan kekuatannya menggunakan 1/3 kekuatan organik Polri.

Pada tahapan inti, pelaksanaannya yang dimulai dari kampanye sampai dengan penghitungan dan perhitungan suara. Pada tahap inilah yang paling rawan terhadap pelanggaran, baik pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Pemilu maupun peraturan perundang-undangan secara umum seperti unjuk rasa tanpa memberi tahukan kepada Polisi sampai konflik antar kontestan. Dalam hal ini terjadi pengerahan massa besar-besaran khususnya pada kegiatan kampanye dengan peserta/kontestan yang cukup banyak dan waktu yang cukup lama. Gangguan-gangguan kamtibmas pada tahapan ini dapat berupa: pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, konflik antar pendukung, sabotase, dan terror. Untuk mengantisipasi hal tersebut Polri menggelar Operasi Khusus Kepolisian (Opssus) kendali pusat dengan sandi Operasi Mantab Brata.

Tahap akhir ada 2 kegiatan yaitu pelantikan Anggota Legislatif/DPD dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi di tahap ini kegiatan difokuskan di ibukota negara Jakarta. Diperkirakan gangguan kamtibmas yang timbul adalah kerawanan

yang dapat mengganggu jalannya pelantikan anggota legislatif, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Pola pengamanan yang digelar di Polda Metro Jaya adalah Operasi Khusus Kepolisian, sedangkan untuk luar Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan gerakan imbalan dengan menggelar Operasi Mandiri Wilayah dan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan. Pelibatan kekuatan khusus Polda Metro Jaya 2/3 dari kekuatan organiknya, untuk TNI dan aparat keamanan lainnya disesuaikan.

Personil TNI dikeluarkan apabila sangat diperlukan. Sebab ada aturan Internasional yang harus dipatuhi, yaitu: perlibatan militer ada aturan internasional yang ketat jika tidak akan menjadi masalah serius dan merepotkan Indonesia sendiri. Isu global yang sedang disosialisasikan adalah civil society artinya negara harus dibangun dengan mengedepankan aspirasi rakyat (demokrasi) dan supremasi hukum. Jadi sistem demokratis tidak memungkinkan kalangan militer mengambil keputusan sendiri untuk terlibat dalam otoritas sipil tanpa persetujuan institusi sipil seperti Presiden, DPR dan Menteri





# RI Dalam PAM PEMILU 2004

## Pertahanan.

Kombes Anton Tabah yang juga pemimpin umum tabloid Polri, Hukum dan Kriminalitas lebih lanjut memprediksikan bahwa gangguan kamtibmas pada Pemilu 2004 tidak jauh beda dengan Pemilu 1999, yang intinya ketidakpuasan dari setiap Parpol peserta pemilu yang mungkin akan menimbulkan gangguan berupa ancaman-ancaman pemalsuan, syarat administrasi, pengrusakan penganiayaan, suap, pelanggaran pemungutan suara, pelanggaran lalu lintas, bentrokan antar pendukung, pencemaran nama baik, dll. Maka dari itu Polri telah mempertajam ancaman-ancaman, gangguan-gangguan dan kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul.

Yang dilakukan Polri dalam melakukan perannya sebagai pengaman adalah:

- Pengawas mulai tingkat pusat, propinsi sampai tingkat kecamatan, dan kantor Polsek diberdayakan sebagai tempat Sekretariat dan tempat pendaftaran calon anggota Panwas Tingkat Kecamatan.
- Pelaksana Utama Pengamanan di TPS-TPS Pemilu.

- Pelaksana Pengamanan dalam masa kampanye Pemilu.
- Penengah atau penyelesaian konflik dalam proses Pemilu.

Secara garis besar, tugas dan wewenang Polri dalam menangani pelanggaran Pemilu diatur secara umum oleh Ketetapan MPR maupun per-UUan:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakkan hukum.
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Anton Tabah memprediksi ancaman yang potensial timbul di beberapa event yaitu saat:

- Kampanye berupa pelanggaran sket kampanye, pengrusakan alat peraga, pelanggaran tempat/lokasi kampanye, pawai/arak-arakan yang mengganggu ketertiban umum, jadwal yang bersamaan, materi yang melanggar perundang-

undangan, dan tindakan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan kampanye.

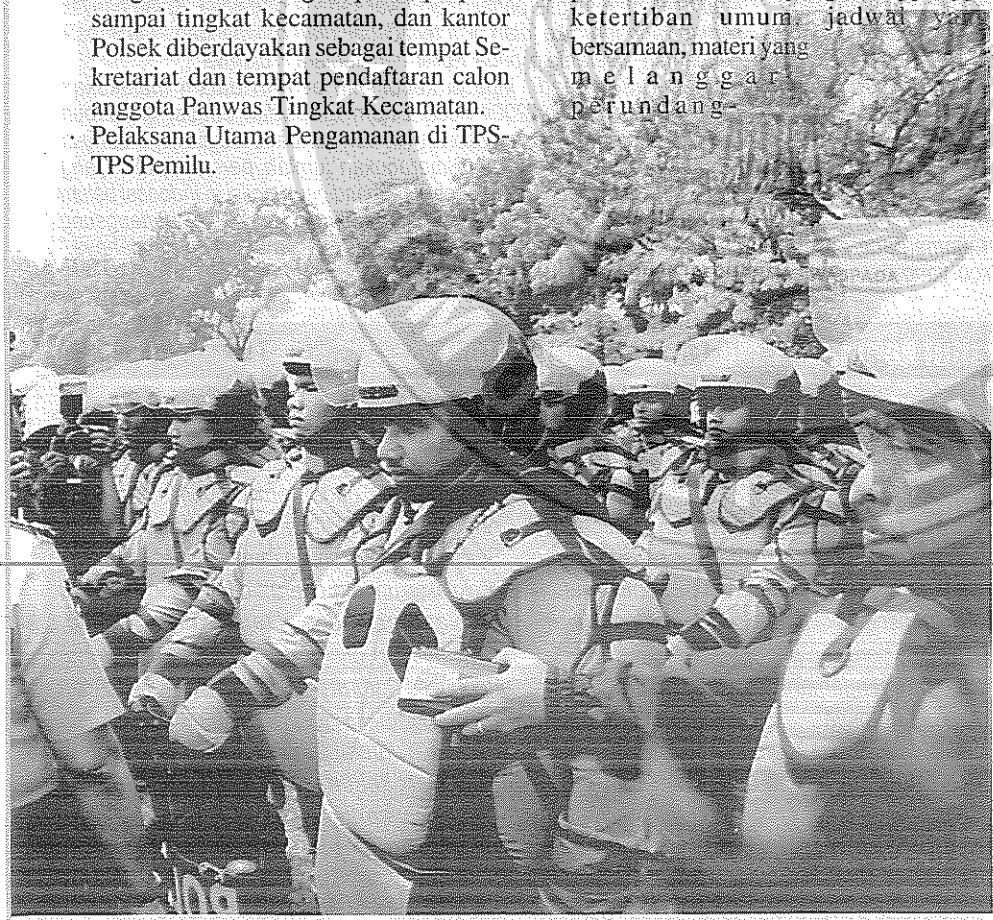
- Sewaktu masa tenang terdapat kegiatan berupa rapat gelap, kampanye terselubung, pelanggaran pemasangan alat peraga disekitar TPS, dan pengancaman, penculikan/penganiayaan juga terror.
- Pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS dapat mengganggu kegiatan pemilu adalah pengancaman, penganiayaan dan perkelahian; kebakaran/ pembakaran, pengrusakan dan sabotase, menghalang-halangi pemilihan dalam guna hak pilih; menghalangi, merintang, mengancam saksi di TPS; juga terdapat manipulasi suara dan pencurian kotak suara.

Dan pada saat pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden pelanggaran tersebut berupa selebaran gelap/pamlet, pengrusakan, pembakaran, sabotase, penculikan, penganiayaan, pembunuhan, dan menghalangi pelantikan juga unjuk rasa.

Dalam melaksanakan pengamanan pesta demokrasi yang sangat besar dan rumit tersebut, Polri tentunya membutuhkan dukungan logistik maupun materil yang tidak kecil. Dukungan logistik dan materil tersebut diprioritaskan untuk alat komunikasi dan transportasi peralatan yang langsung mendukung operasional di lapangan antara lain: kendaraan, kapal, pesawat, senjata, mesin stasioner pembangkit tenaga listrik.

Untuk masalah pengamanan Pemilu 2004 sudah diinternalisasikan oleh Mabes Ke Polda-Polda seluruh Indonesia. Bukan hanya masalah taktik teknis pengamanan pemilu saja, bahkan komunikasi massa, taktik menghadapi media massa dan takuk teknik negosiasi menghadapi unjuk rasa.

Keberhasilan pemilu 2004 bukan hanya terletak pada faktor keamanan dan pengamanannya tetapi juga partisipasi luas dari seluruh masyarakat dengan parpol-parpol peserta pemilu. Sebab itulah ditingkat pusat telah membentuk memory of understanding (MOU) sama dengan kesepakatan antara Kapolri dengan parpol-parpol peserta pemilu. Demikian Anton Tabah menelaskan.  DNO







**Permadi SH, Komisi 1**

## Ragu Pemilu Berjalan Lancar

**MENURUT** Permadi, pemilu 2004 mungkin tidak berjalan mulus dan tidak bisa tepat waktu. Selain ancaman sabotase yang dilakukan kelompok kepentingan, juga karena masalah-masalah teknis di dalam KPU, Panwaslu, dan persoalan internal partai-partai sendiri. Persoalan teknis misalnya, keterlambatan pengadaan kotak suara. Sejak tender dilakukan, sudah muncul banyak persoalan. Tender, berjalan tidak semestinya. "Ada indikasi permainan yang dilakukan oknum. Akibatnya, terjadi keributan-keributan, dan muncul tuduhan-tuduhan adanya kerjasama," kata Anggota Komisi I DPR RI.

Persoalan teknis lainnya yaitu masalah pencetakan kertas suara dan ketepatan pengirimannya ke seluruh TPS. Peralannya, pengiriman tersebut, tidaklah mudah. Saat ini transportasi antar propinsi saja belum memadai, apalagi sampai ke pelosok desa. Selain kedua masalah tersebut, dalam proses pendaftaran pemilih menurut Fungsi PDI-P juga masih banyak kendala yang belum terselesaikan. Padahal, pendaftaran pemilih seharusnya sudah selesai bulan Mei 2003, tetapi sampai sekarang banyak masyarakat yang belum terdaftar. Di Jakarta masih banyak warga yang belum masuk dalam daftar pemilih. "Jadi sa-ya ragu apakah pemilu sekarang akan tepat waktu," tutur tokoh Paranormal ini.

Permadi semakin ragu ketika melihat kurangnya sosialisasi sistem pemilihan umum nanti. Sosialisasi sistem pemilu 2004 masih sangat kurang. "Seakan-akan pemilu ini masih seperti pemilu 1999, hanya mencoblos tanda gambar," tegasnya. Padahal pemilih pada pemilu 2004 nanti harus mencoblos tanda gambar dan nama yang akan dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan masalah yang ditimbulkan Panwaslu, menurut Permadi muncul ketika lembaga tersebut terlalu over acting dalam melakukan pengawasan. "Panwaslu ini agak aneh, bisa-bisanya menuduh partai-partai yang merayakan ulang tahunnya sebagai bentuk kampanye," tandasnya. Kebijakan tersebut malah tidak diberlakukan kepada calon presiden. Padahal masyarakat melihat sendiri beberapa calon presiden yang telah mengkampanyekan dirinya. Sementara partai peserta pemilu tidak boleh kampanye. "Kampanye presiden dini kok tidak digubris," katanya.

Permasalahan lainnya kata Permadi berasal dari internal partai peserta pemilu. Perebutan "nomor jadi" merupakan pemicu yang paling kuat.

Soalnya, masing-masing caleg parpol menganggap jika mereka mendapatkan nomor jadi, maka akan terpilih sebagai anggota legislatif. Sebenarnya, menurut Permadi nomor urut itu tidak membawa banyak pengaruh. "Biar nomor urutnya 10, kalau disosialisasikan dengan baik, bisa juga ia terpilih. Kalau nama dengan nomor 10 itu banyak dikenal masyarakat, pemilih pasti akan mencoblosnya," ungkapnya. Persoalan yang dihadapi partai juga terjadi karena banyaknya calon legislative yang memalsukan ijazah dan memanipulasi data-data lainnya demi memenuhi syarat pencalonan.

Melihat kekurangan-kekurangan tersebut, KPU menurut Permadi seharusnya telah jauh-jauh hari memberitahukan kalau memang Pemilu sulit dilaksanakan. Tujuannya untuk mengantisipasi jika pemilu harus diundur. "Jika pengunduran jadwal pemilu dilakukan mendadak dapat menimbulkan keributan-keributan," ujarnya. Kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh partai-partai yang merasa tidak akan menang. Bukan hanya sekedar protes yang mungkin mereka lakukan, tetapi bisa mengarah kepada tindakan anarkis.

Banyaknya potensi yang bisa memicu konflik menuntut Polri sebagai penanggung jawab keamanan untuk bekerja lebih keras. Polri dalam melaksanakan tugasnya, akan dibantu oleh personil dari TNI. Pelibatan satgas Partai, menurut Permadi, bisa memicu bentrokan antar satgas. Mau tidak mau satgas partai lebih loyal kepada partainya. Kalau banyak satgas yang turun ke jalan bisa terjadi benturan di lapangan. "Lebih baik pengamanan diserahkan pada Polisi dan Tentara," ujarnya.

Menurut Permadi, kinerja kepolisian sendiri dalam melakukan pengamanan pemilu 2004 secara normatif sudah bagus. Walaupun demikian polisi harus menyiapkan diri dengan baik. Begitu juga dengan tentara. Sayangnya Permadi meragukan jumlah personil polisi yang diterjunkan ke lapangan. Komposisi perbandingan polisi di Indonesia belum seimbang. "Kalau terjadi kerusuhan diseluruh Indonesia, berlangsung secara terpisah, polisi dan tentara tidak akan mencukupi jumlahnya," ungkapnya.  DNO



**Ir. Drs. T. Syaiful Achmad, B. Mu. E; Fraksi Reformasi**

## Sosialisasi Masih Kurang

**SOSIALISASI** sistem Pemilu 2004 yang merupakan tugas dari KPU itu belum sampai ke desa-desa. Oleh karena itu, KPU menurut Syaiful harus lebih giat dalam mensosialisasikan aturan mekanisme pemilu 2004 itu sendiri. "Jangan sampai di pemilihan nanti, banyak suara yang tidak syah karena kesalahan dalam mencoblos," tuturnya. Berkaitan dengan tugas polisi sebagai penanggung jawab keamanan pemilu nanti, Syaiful mengatakan kalau polisi sudah mulai lebih aktif dan bersikap pro aktif. "Semoga mereka mampu mengamankan pelaksanaan pemilu nanti," harapnya.

Selain Polri, tugas keamanan menurut Syaiful, juga harus melibatkan unsur dari TNI. Hal ini menurutnya karena jumlah personil polisi belum ideal sebagaimana di Negara-negara lain. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, polisi harus benar-benar netral sesuai dengan

apa yang dipublikasikan kepada masyarakat. "Mereka ini, baik aparat TNI dan Polri harus sangat netral, pada pemilu 2004 nanti," kata Anggota DPR-RI dari fraksi reformasi ini.

Syaiful mengatakan, pelibatan TNI lebih banyak difokuskan untuk di daerah-daerah konflik. Untuk di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), pengamanan dilakukan oleh polisi terutama Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Aceh yaitu Kodam. Di Aceh yang berkuasa adalah penguasa darurat jadi kepolisian dan gubernur di bawah kekuasaan penguasa darurat. "Pengamanan di Aceh berbeda dengan daerah lainya," tutur anggota DPR perwakilan NAD ini. Harapan Syaiful mudah-mudahan pemilu 2004 dapat berhasil dengan baik.  DNO

# Karena Dana Besar, Polisi Harus Profesional

**P**EMILU 2004 ini sebetulnya momentum yang tepat dan baru untuk proses demokrasi, karena dalam pemilu ini memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden selain memilih orangnya juga dipilih partainya secara langsung. Tetapi saya sesalkan kepada KPU juga pemerintah karena dalam mensosialisasikan system ini belum bertugas secara baik. Padahal dana untuk KPU sudah cukup besar sebanyak 6 triliun rupiah, tetapi sosialisasinya parah, tidak sampai daerah. Jadi didaerah tingkat desa dan kecamatan ini banyak orang yang belum mengerti. Saya sering turun ke daerah, saat kita (partai politik) tanyakan mereka tidak paham, akhirnya kita yang memberi penjelasan kepada mereka.

Kalau tidak berhasil mensosialisasikan hal ini berarti KPU tidak berhasil sehingga orang-orang yang di KPU saat ini di usah dipilih untuk masa-masa yang akan datang. Termasuk pendaftar calon pemilih di luar negeri banyak sekali yang tidak terdaftar, jadi banyak sekali suara yang terbuang percuma, sehingga banyak yang tidak ikut pemilu. DNO

Secara yuridis, tugas pengamanan dalam negeri memang menjadi tugas polisi. Begitu juga dengan pemilu. Dari beberapa pemilu yang dilakukan sebelumnya, baru kali inilah tanggung jawab keamanan pemilu berada sepenuhnya di pundak Polri. Dulu, ketika Polri masih berada di bawah komando Panglima ABRI, institusi ini tidak leluasa untuk merealisasikan ide-idenya. Sebaiknya, masyarakat Indonesia menurut Effendi Choirie harus mulai menanamkan rasa kepercayaan mereka kepada Polri. "Kita percaya kepada kepolisian dia bisa melaksanakan tugasnya secara baik," katanya.

Tetapi, kata Effendi, tugas pengamanan Pemilu kali ini merupakan tugas berat yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, negara memberi dukungan dana operasional yang cukup besar. "Ini tidak seperti dana rutin biasa, tetapi ada biaya khusus," kata wakil ketua Komisi I.

Lebih lanjut, anggota DPR dari fraksi PKB ini mengatakan bahwa biayanya

pengamanan Pemilu 2004 sebanyak 1 triliun lebih. Kepolisian diharapkan betul-betul serius dan tidak main-main.

Sayangnya, sejauh ini Effendy belum bisa menilai kinerja dari kepolisian dalam pengamanan Pemilu karena belum dapat informasi yang lengkap mengenai perkembangan tersebut. Effendy baru bisa memberikan komentarnya setelah diadakan rapat kerja dengan kepolisian. Dari situlah Effendy akan mendapatkan informasi tentang bagaimana kesiapan polisi dalam pengamanan nanti. Khususnya, pola pengamanan di daerah rawan konflik.

Sedangkan hubungannya dengan satgas parpol Effendy berpendapat bahwa keberadaan satgas parpol, tidak menjadi masalah dalam pemilu. Satgas hanya bertugas mengamankan internal partainya. Sedangkan polisi tidak bisa masuk ke dalam kepengurusan partai.

Polisi itu tugasnya diluar. "Mereka ini justru membantu tugas kepolisian," katanya. "Tidak ada hubungan kerja yang tumpang tindih antara satgas dan polisi," katanya menambahi. Menurutnya, yang penting ada koordinasi antara pihak kepolisian dengan pengamanan partai. Sebagai contoh ketika kampanye dilakukan atau ketika partai sedang mengadakan rapat internal.

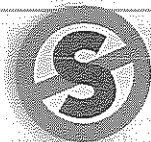
Justru yang terasa mengganjal dalam benak Effendy adalah keterlibatan TNI dalam pengamanan nanti. Menurutnya TNI belum waktunya turut serta dalam mengamankan pemilu 2004. "Sekarang waktunya uji coba untuk kepolisian sendiri, biarkan TNI menjankan tugas sebagai pertahanan, bukan keamanan dan ketertiban dalam negeri. TNI," ungkapnya.

Walaupun demikian, untuk pengamanan di daerah-daerah yang rawan konflik, Effendy tidak mempermasalahkan keberadaan TNI. Effendy mengambil contoh pengamanan di Nangroe Aceh Darussalam dan Papua. Sampai saat ini Papua masih menjadi perhatian khusus oleh DPR.

☑ DNO







# STOP PENDAPAT MASYARAKAT

RINITA, Mahasiswa Universitas Dr. Supomo Beragama

## Berharap Cemas dengan Pemilu

**K**RIWIKAN jadi grojogan. Pepatah Jawa tersebut tepat untuk menggambarkan pendapat Rinita tentang pemilu 2004 nanti. "Ada hambatan-hambatan kecil yang bisa menjadi besar dan itu bisa menghambat pelaksanaan pemilu,"

katanya. Prediksi tersebut, tidaklah berlebihan, sebab pemilu 2004 nanti dilaksanakan pada saat kondisi bangsa Indonesia masih labil. Berbagai persoalan kebangsaan terus menyelumuti negeri yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Separatisme, masih terus mengancam. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) misalnya, sampai sekarang masih bergejolak dengan aksi Gerakan Separatisme Aceh (GSA).

Begitu juga di beberapa daerah, konflik atas nama SARA, terus berlanjut. Poso, Morowali, Ambon dan Papua belum menemukan ketentraman. Kondisi tersebut, masih diperparah dengan krisis multidimensi yang tak tahu kapan akan berakhir. Hanya, Indonesia dari lima negara di Asia yang belum dapat bangkit dari keterpurukan. Persoalan lain, yakni dengan terus meningkatnya angka pengangguran. "Ada kelompok yang bisa memanfaatkan kondisi bangsa ini," kata mahasiswa Universitas Dr. Supomo Beragama ini. Namun Rinita tak mau menjelaskan kelompok siapa yang akan bermain di dalamnya. "Itu butuh data-data yang valid," tegasnya.

Walaupun pemilu akan menemui banyak hambatan, tetapi Mahasiswa kelahiran Jakarta, 27 Mei 1981 ini berharap pemilu akan berjalan lancar. Oleh karena itu, kepada Polri sebagai penanggung jawab keamanan pemilu nanti, ia menginginkan adanya perubahan dalam tindak pengamanan. "Polisi harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada represif," tutur dara Betawi ini.

Selama ini, sebagai aktifis yang pernah mengikuti berbagai aksi yang digelar mahasiswa ini sering berhadapan dengan polisi yang bertindak represif. Padahal, cara penanganan tersebut, menurutnya akan memperburuk citra polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dalam pemilu nanti represif hanya dilakukan jika kondisi sangat genting.

Agar masyarakat dapat merasa aman, Polisi menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus menggalang elemen lain yang terkait, baik itu KPU, Panwaslu, partai politik, LSM dan lainnya.

Sedangkan kepada para kontestan pemilu nanti, mahasiswa semester sembilan ini mengharapkan agar mereka bermain dengan fair dan aspiratif. Parpol, tidak perlu melakukan intrik-intrik atau manufer yang bisa memperkeruh suasana. "Masyarakat telah jenuh dengan adegan yang dimainkan," tegas mahasiswa yang tidak begitu percaya dengan partai politik.

Sampai saat ini, Parpol katanya lebih banyak mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan masyarakat dan bangsa. Mereka lebih sering menggunakan isu-kemasyarakatan ketika kampanye. Tetapi setelah mendapatkan kursi, para politisi lupa dengan janjinya.

Ketidakpercayaan dirinya, juga karena belum ada partai politik yang mempunyai platform dengan visi misi yang jelas.

Dengan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Rinita berharap akan terpilihnya pemimpin yang bijaksana, bukan pemimpin yang cerdas. "Bijaksana pasti cerdas, sedangkan orang yang cerdas belum tentu bijaksana." ujarnya.

☒YITMAN



<< Yudi, Security, 22 tahun

## Harus Selektif

UNTUK pemilu 2004, saya kurang tahu, mungkin partai bertambah. Kita sendiri sebagai pemilih harus selektif. Saya tidak begitu tahu tentang pemilu 2004, tapi yang saya tahu partai yang lolos untuk ikut pemilu 2004 sebanyak 24. Saya tidak begitu paham sistem pemilihan untuk calon presiden dan calon legislatif di tahun 2004 ini, sebab informasi yang saya dapat dari TV dan koran kurang dikarenakan waktu kerja yang panjang dan sangat kurang informasi. Maka dari itu saya tidak begitu tahu menahu tentang pemilu 2004.

Syawaluddin Sihotang, Mahasiswa

## Pesimis

HASIL dari pemilu 2004 saya pesimis, jadi tidak banyak berharap. Tapi secara sistem karena orang belum tahu bentuknya apa pemilu 2004, orang bilang beda, tapi bedanya seperti apa kita tidak tahu. Jika calon Presiden dari partai yang mendapat hasil suara yang paling banyak, kita dapat menebak siapa yang akan duduk di kursi penguasa Indonesia itu. Maka partai yang menang dialah yang berkuasa, jadi sama saja dengan yang lalu, cuma cara pemilihannya yang menurut mereka beda. Sementara masalah presiden saja, contoh PDIP tidak lepas dari Megawati. Kalau melihat dari sistem yang

ada, hanya merubah sampul saja kok. Yang perlu menjadi pertanyaan, rakyat tahu tidak dengan sistem pemilu 2004 ini? Takut-takut rakyat akan dibohongi dengan sistem ini. Pesimis dari saya ini dikarenakan, belum tahu dengan sistem baru ini dan dari sosialisasi mereka itu saya anggap masih kurang. Seperti kita harus disuruh mencicipi makanan baru kita harus tahu pula bahan makanan itu, apakah layak untuk kita, jangan sampai kita akan alergi atau keracunan karena makanan itu. Untuk memilih calon presiden sendiri, persyaratan mereka dapat ditempatkan posisinya menjadi presiden kita saja tidak tahu. Belum lagi persaingan politik yang tidak sehat. Pada pemilu 2004 ini yang main adalah sipil semua, apakah tidak ada kecendrungan militer akan cemburu. Apakah pemilu 2004 aman? Boleh jadi kondisi makin hancur. "dalang" pemilu 2004 ini kita tidak tahu. Apalagi kita sudah di cap sebagai bangsa yang paling cepat gonta-ganti presiden.



Anton, tukang ojek

## Belum Paham

PEMILU bagi Anton tidak akan membawa perubahan yang berarti. Bukan kali ini saja Bapak dua anak ini ikut menyoblos partai, tetapi manfaat bagi diri dan keluarganya kurang terasa. "Dari dulu kalau tidak cari makan sendiri, mana bisa hidup" kata Ayah dua anak ini. Walaupun pemilu di gelar satu setengah bulan lagi, tetapi Anton sampai sekarang belum paham bagaimana proses pemilihan nanti. Anton belum tahu bagaimana caranya memilih calon legislatif yang akan duduk di DPR. Ia pun kurang begitu peduli dengan siapa calon presiden terpilih. "Yang penting mudah untuk mencari duit," tuturnya. Anton berharap pemilu nanti akan berjalan sukses dan kondisi bangsa Indonesia segera membaik.

☑ DNO

